

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 7 Februari 2022
Waktu : 10.25 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022;
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan
3. Lain-lain
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 44 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) hadir secara virtual;
7. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) hadir secara virtual; serta
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dan Lain-lain dibuka pukul 10.25 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pokok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memperbaiki kinerja dengan meningkatkan jumlah Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK), baik di pusat dan maupun di daerah, dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan, sebelum diserahkan kepada pihak penerima bantuan dan/atau Pemerintah Daerah.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta data lainnya selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2022, sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Februari 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Sekretaris Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove,

Ttd.

Ir. Hartono, M.Sc.